

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno (Orde Lama) dan masa Soeharto (Orde Baru). Orde baru merupakan masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan G-30S/PKI pada tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.

Orde Baru merupakan periode kepemimpinan politik yang panjang dalam sejarah politik Indonesia. Seorang presiden berkuasa selama kurang lebih 32 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi.

Keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Pelantikan Jenderal Soeharto menjadi presiden dalam sidang MPRS bulan Maret 1968 menandai surutnya dua kekuatan politik utama dalam Demokrasi Terpimpin dari panggung politik nasional, yaitu Soekarno dan PKI dengan meninggalkan ABRI seorang diri. Maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan tersebut dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri

Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jendral Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.

Pelaksanaan politik Orde Baru diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tonggak munculnya Orde Baru merupakan wujud pelaksanaan Supersemar yang bukan hanya diartikan sebagai kepercayaan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, namun juga kehendak rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 1966, MPRS menyelenggarakan sidang umum yang menerima dan menetapkan Supersemar dalam salah satu kesepakatan, dari 24 ketetapan yang dihasilkannya dalam sidang tersebut.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional tersebut, dilakukan dengan cara membuat konsensus nasional, yaitu: Pertama, berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kedua, adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus pertama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua ini lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah Orde Baru membentuk sebuah kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera yang merupakan singkatan dari Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat yang selanjutnya diberi tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tugas ini dikenal dengan sebutan "Dwi Darma Kabinet Ampera". Sedangkan program kerja-Nya disebut Catur Karya Kabinet Ampera, yaitu: (1) memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, (2) melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti yang tercantum dalam ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 yaitu pada 5 Juli 1968, (3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, sesuai dengan Tap No. XI/MPRS/1966, (4) melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul "**Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982)**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan bahwa identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Berlangsungnya Orde Baru setelah keluarnya SUPERSEMAR.
2. Peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru
3. Pelaksanaan politik dalam negeri Indonesia era kepemimpinan presiden Soeharto (1971-1982).

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian ini, maka penulis membatasi masalah penelitian yaitu: Pelaksanaan politik Indonesia era kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982).

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan politik kepartaian era kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982) ?
2. Bagaimana dampak politik kepartaian bagi kehidupan politik Indonesia (1971-1982) ?

E. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan berpedoman kepada tujuannya, maka akan lebih mudah mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan politik kepartaian era kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982).
2. Untuk mengetahui dampak politik kepartaian bagi kehidupan politik Indonesia (1971-1982).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh setelah melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Indonesia Era kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982).
2. Untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982).
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
4. Memperkaya informasi bagi akademi UNIMED, khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami mengenai Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982).
5. Menambah pengayaan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah tentang penelitian yang terkait.
6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah.
7. Menambah pembendaharaan karya ilmiah bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Negeri Medan.